

KEDEWASAAN POLITIK BERDASARKAN PANCASILA MEMPERKUAT KOMITMEN PERSAUDARAAN

Justice Zeni Zari Panggabean
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Email: justice.panggabean@gmail.com

Abstrak- Artikel ini memiliki tujuan yaitu: pertama, mendeskripsikan kajian teoritis bahwa pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah komitmen kebangsaan. Kedua, pancasila sebagai alat pemersatu untuk mengatur sistem ketatanegaraan di dalam penyelenggaraan negara. Ketiga, meneguhkan pentingnya pancasila sebagai komitmen persaudaraan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai fondasi terlaksananya kedewasaan politik. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap kajian pustaka yang berkaitan dengan tema kedewasaan politik berdasarkan pancasila memperkuat komitmen persaudaraan. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, diharapkan dapat dipelihara dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia sehingga membentuk gagasan, teori, konsep dan ide baru tentang kehidupan politik. Maka pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia kedewasaan politik yang tidak menghilangkan komitmen persaudaraan, dan mampu menyatukan seluruh kelompok masyarakat yang membentuk negara berdaulat.

Kata-kata kunci: Kedewasaan Politik, Pancasila, Komitmen Persaudaraan

Abstract : The main purpose of this study was to describe the theoretical study of the Pancasila as the basis of the state for developing nationality commitment, and to affirm the importance of the Pancasila as a brotherly commitment to strengthen the unity of the Indonesian nation. Pancasila is as the foundation for implementing political maturity. The method used was a descriptive analysis of literature studies on the theme of political maturity based on the Pancasila reinforcing brotherhood commitment. This study concluded that the values contained in the Pancasila were expected to be maintained and developed by the Indonesian people to form new ideas, theories, and concepts on political life. Then, the Pancasila can be used as the basis and guideline in regulating Indonesian human attitudes and behavior in political maturity that does not eliminate the commitment of brotherhood, and is able to unite all groups of people who form a sovereign state.

Key words: Political maturity, brotherhood commitment

PENDAHULUAN

Indonesia yang kaya akan keanekaragaman masyarakat budaya dan agama memiliki kewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila sebagai dasar negara memberikan nilai-nilai yang membentuk komitmen bangsa Indonesia menjaga persaudaraan ditengah-tengah kemajemukan yang ada. Peran ini dapat diperkuat jika pancasila dijadikan sebagai bentuk komitmen persaudaraan.

Maraknya perbedaan pendapat dalam bidang politik dapat memecahbelah antara satu dengan yang lain. Sehingga dapat membuat ketidaksatuan bangsa yang mengakibatkan persaudaraan itu tidak bersatu. Maka diperlukan peran bangsa Indonesia untuk memperkuat persaudaraan dengan menjadikan pancasila sebagai dasar komitmen, Untuk menyatukan seluruh kelompok masyarakat serta membentuk negara berdaulat. Pancasila harus menjadi paradigma pembangunan baik di bidang politik.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik terutama ditekankan pada proses reformasi yang berdasar pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila. Politik harus bersih serta taat etika serta hukum. Supaya praktik-praktik politik kotor yang menghalalkan segala cara dengan fitnah, provokasi, *money politic*, dan adu domba tidak terjadi.

Fenomena yang terjadi adalah adanya perbedaan-perbedaan cara pandang berpolitik. Ada juga yang memakai agama sebagai ideologi politik. Hal ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan. Perbedaan ini mengakibatkan dampak negatif yang membentuk politik identitas, dengan mengaitkan isu suku, ras dan agama.

Maka dibutuhkan satu dasar untuk menopang dan dijadikan fondasi menjaga persaudaraan tetap utuh. Hal yang dimaksud adalah nilai-nilai pancasila yang akan tetap memperkokoh negara Indonesia. Meneguhkan pentingnya pancasila sebagai komitmen untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai fondasi terlaksananya kedewasaan politik. Kedewasaan politik yang dimaksud adalah politik yang tidak mengumbar ujaran kebencian, memfitnah dan memecahbelah bangsa.

Agar suatu kemajemukan dapat kokoh bersatu, satu syarat mutlak harus dipenuhi semua harus bersedia untuk saling menerima dan saling menghormati dalam kekhasannya. Pancasila mengajarkan nilai-nilai untuk setiap rakyat Indonesia menjaga harga diri melalui berucap dan bersikap sopan serta beradab. Dalam hal ini bangsa Indonesia menyatakan diri bangsa dan negara yang berketuhanan, yang religius, ketika diperhadapkan dengan tahun politik.

Ketika terjadi politik identitas meluas, komitmen yang mendasari persatuan Indonesia akan terancam. Politik identitas cenderung terus memecahbelahkan persatuan bangsa. Semakin politik identitas meluas, intoleransi akan bertambah. Akhirnya semua yang tidak taat pada kediktatoran baru itu akan disingkirkan. Akhir politik identitas ialah disintegrasi bangsa dan negara.

Mayoritas bangsa Indonesia tetap menginginkan persaudaraan yang kuat diantara semua, dan ingin hidup bersama dalam damai. Mainstream agama-agama besar meyakini Pancasila dan merasa diutus Allah untuk menyebarkan damai-Nya kepada semua.

Pancasila sebagai benteng politik masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjaga perdamaian, persatuan, dan persaudaraan dengan saling menghargai, menghormati, dan gotong royong. Untuk itu berbagai pihak diharapkan menjaga pemahaman dan pengamalan pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta harus ditingkatkan.

Namun, realitas sosial-politik saat ini, terutama setelah reformasi, menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan: konflik dan kekerasan berlangsung hanya karena persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak fundamental tapi kemudian disulut dan menjadi isu besar yang melibatkan etnis dan agama. (<https://alifluman.wordpress.com/2013/04/22>)

Dari beberapa fenomena di atas tampak kehidupan politik di Indonesia masih memperlihatkan adanya kelompok-kelompok yang berpeluang memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui konteks politik. Oleh karena itu melihat pentingnya pancasila sebagai fondasi komitmen persaudaraan di tahun politik maka, Pertanyaan pada pokok bahasan penulisan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pancasila dijadikan ideologi politik?. Bagaimanakah konsep nilai-nilai pancasila memperkuat komitmen persaudaraan bangsa Indonesia?.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pancasila sebagai ideologi politik bangsa Indonesia. Selain itu, tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pentingnya pancasila sebagai fondasi komitmen persaudaraan di Tahun Politik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada literatur (pustaka). Penulis menggunakan pandangan teori para ahli tentang kedewasaan politik berdasarkan

pancasila dan berbagai pendekatan yang berkaitan ideologi politik bangsa Indonesia. Penulis menguraikan berbagai teori yang mendeskripsikan pentingnya pancasila sebagai fondasi komitmen persaudaraan di Tahun Politik

Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.

Jadi dengan demikian, Pancasila merupakan dasar negara. (*Kompas*, Presiden: "Pertahankan Pancasila Habis-Habisan", 2 Juni 2000). Penggunaan istilah Pancasila sebagai kontrak sosial dapat dilacak dalam pidato Soekarno yang mengatakan :

"Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu Weltanschauung" yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanusi setuju, yang sdr. Abukoesno setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita mencari semua satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju."

Kalimat "kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju" menurut Onghokham dan Andi Achdian, dalam bahasa politik modern tidak lain adalah *kontrak sosial*. (Onghokham dan Andi Achdian, 2006:94)

Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya. Ideologi adalah seperangkat tujuan dan ide-ide yang mengarahkan pada satu tujuan, harapan, dan tindakan satu pemerintahan. Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat

bekerja, dan bagaimana cara mengatur kekuasaan.

Pancasila yang berakar pada kehidupan bangsa Indonesia pada hakikatnya mengandung pandangan yang mengutamakan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Sekalipun dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, tetapi itu tak menghilangkan hakikat Pancasila yang substansinya adalah harmoni. Harmoni bisa di artikan tidak adanya pengutamaan kepada kepentingan individu saja sebagaimana di kehendaki individualisme. Suatu sistem politik yang secara efektif berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan masyarakat akan merupakan jaminan yang kuat bagi terciptanya stabilitas yang dinamis di segala bidang kehidupan. (Kaelan MS, 2004:49)

Pancasila sebagai ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membicarakan Pancasila sebagai ideologi atau ide-ide yang penting dalam berbagai bidang kehidupan yang di pandang perlu ataupun di pandang penting untuk rangka mencari titik temu dalam rangka menyampaikan dan menyaserasikan orientasi, persepsi dan penghayatan terhadap ideologi atau ide-ide Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Proses pengembangan pemikiran tentang Pancasila, diharapkan dapat memelihara dan mengembangkan gagasan, teori, konsep dan ide baru tentang kehidupan politik, dan semua proses kehidupan bangsa. Sehingga relevansi yang kuat dengan kepentingan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara. Termasuk di dalamnya sistem kehidupan keagamaan, tanpa mengurangi etika dan nilai-nilai serta pengalaman keagamaan masing -masing agama. Suatu konsep yang abstrak seperti "Pancasila adalah ideologi terbuka" memerlukan waktu untuk memantapkan proses pemahaman, penghayatan pembudayaan, dan pengalamannya dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, dalam arti memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. (Tim Lemhanas, 2000: 94).

Ideologi terbuka, berdasarkan banyak pemahaman, mengandung semacam dinamika internal yang memungkinkan di lakukan perubahan terhadap makna pada setiap waktu, sehingga isinya tetap relevan dan perubahan bukan berarti mengganti nilai- nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Bila mana ideologi itu direvisi, apalagi diganti maka ideologi tersebut sudah kehilangan jati dirinya. Secara formal ideologi itu masih ada, tetapi secara substansial ia tidak ada lagi, karena sudah berganti dengan nilai - nilai yang baru.

Dinamika yang terkandung dalam suatu ideologi terbuka membentuk kemapanan dan memperkuat relevansi ideologi itu dalam masyarakat. Tetapi faktor itu terkandung dari beberapa faktor, yaitu: *Faktor pertama* adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut. *Faktor kedua* adalah seperti sikap dan tingkah laku masyarakat terhadapnya. *Faktor ketiga*, kemampuan masyarakat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang ideologi yang dimilikinya itu. Keempat, menyangkut *Faktor Keempat*, seberapa jauh nilai - nilai yang terkandung dalam ideologi itu membudaya dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Ideologi membentuk sudut dinamis, dinamis yang pertama dari ideologi politik adalah pencerminan realitas yang hidup di masyarakat yang muncul untuk pertama kali atau paling tidak pada awal kelahirannya. Dinamis kedua dari ideologi adalah dinamis idealisme, yaitu lukisan kemampuan memberikan harapan kepada berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat untuk memiliki kehidupan bersama secara lebih baik, dan masa depan yang lebih cerah. Sedangkan dinamis ketiga adalah Dinamis fleksibilitas, lukisan kemampuan untuk mempengaruhi, sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat.

Pancasila menjadi dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sepanjang Pancasila dilakukan dan diwujudkan, bukan hanya dipajang sebagai dekorasi yang indah. Pancasila adalah paham yang terbuka, maka bangsa Indonesia harus bersedia mengambil

segi-segi positif dari paham-paham yang lain, termasuk individualisme dan liberalisme, guna memperkaya dan memperkuat nilai Pancasila.

PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Perikat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu, karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan oleh bangsa ini. Sosrodiningrat menegaskan bahwa persatuan berarti bebas dari rasa perselisihan antar golongan, pertikaian antar individu dan suku. Saat yang sama, perhatian, penghargaan, dan penghormatan terhadap corak dan bentuk kebiasaan kelompok lain menjadi penting untuk menopang persatuan ini.

Persatuan merupakan kata yang penting di dalam Indonesia yang beragam dalam hal agama, suku, etnis dan bahasa. Pentingnya persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya bertumpu pada perangkat keras seperti kesatuan politik (pemerintahan), kesatuan teritorial, dan inklusivitas warga, akan tetapi juga memerlukan perangkat lunak berupa eksistensi kebudayaan nasional. Bahwa persatuan memerlukan apa yang disebut Soekarno sebagai “identitas nasional”, “kepribadian nasional”, dan “berkepribadian dalam kebudayaan”. Menurut Hardono Hadi, “Kalau Bhinneka Tunggal Ika” menjadi semboyan perjuangan bangsa Indonesia, maka hal itu sekaligus menjadi batu penguji manusia Indonesia, sejauh mana dia menghayati sila pertama, kedua, bahkan ketiga”. (P. Hardono Hadi, 1994:99)

Prinsip Indonesia sebagai negara “bhineka tunggal ika” mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan dan kesatuan. Pancasila haruslah dijadikan dasar kehidupan bersama karena di dalamnya mengajarkan nilai-nilai kehidupan bersama, multikulturalisme, persatuan, demokrasi, keadilan sosial dan penghormatan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Pancasila

haruslah menjadi perekat bangsa, menjadi landasan persatuan dan kesatuan Indonesia. Tak ada persatuan tanpa keadilan. Dengan kata lain, persatuan haruslah dibangun atas dasar keadilan dan kesejahteraan sosial. Mustahil, negara bisa membangun persatuan jika tidak ditopang keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu, sila ketiga dan sila kelima dalam Pancasila memiliki keterkaitan erat. Hal ini terumus dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa ketika negara sudah terbentuk maka kekayaan negara dieksplorasi demi kemaslahatan warga negara Indonesia. Sehingga tidak adil jika hanya satu daerah yang menikmati hasil pembangunan. Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu, karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan oleh bangsa ini.

Setiap agama yang ada pasti memiliki ajaran tentang gambaran kehidupan ideal, yang masing-masing berbeda-beda. Perbedaan itu tidak akan mungkin dapat dipersamakan. Apalagi, perbedaan itu sudah melewati dan memiliki sejarah panjang. Akan tetapi, masing-masing pemeluk agama lewat para tokoh atau pemukanya, sudah berjanji dan berekrar akan membangun negara kesatuan berdasarkan Pancasila itu.

Seiring dengan hal tersebut ada pendapat yang menyatakan bahwa agama juga dapat mempersatukan. Dengan alasan bahwa masing-masing agama selalu mengajarkan tentang persatuan, kebersamaan dan tolong menolong, sebagai dasar hidup bersama. Tidak sedikit orang merasakan bahwa perbedaan selalu menjadi halangan untuk bersatu. Maka Pancasila, dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, merangkul dan sekaligus menyatukan pemeluk agama yang berbeda itu. Mereka yang berbeda-beda dari berbagai aspeknya itu dipersatukan oleh cita-cita dan kesamaan idiologi bangsa ialah Pancasila.

Oleh sebab itu, Pancasila, sejarah dan filsafatnya harus tetap diperkenalkan dan diajarkan kepada segenap warga bangsa ini, baik lewat pendidikan formal maupun non formal. Pancasila memang hanya dikenal di Indonesia, dan tidak dikenal di negara lain.

Namun hal itu tidak berarti, bahwa bangsa ini tanpa Pancasila bisa seperti bangsa lain. Bangsa Indonesia memiliki sejarah, kultur, dan sejarah politik yang berbeda dengan bangsa lainnya. Keanekaragaman bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu, ialah Pancasila.

Seiring dengan hal diatas cita-cita demokrasi Indonesia yang terkandung dalam Pancasila juga memperjuangkan emansipasi dan partisipasi yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses epistemologis akan sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa sebagai suatu identitas bangsa dan negara Indonesia. (Kaelan, 2014:13).

Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permasyarakatan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya "kesederajatan/persamaan dalam perbedaan".

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif,

yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Peranan Idiologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Jadi Pancasila harus tercermin dalam segala bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gagasan-gagasan kejiwaan apakah yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Kaelan, 2014:124)

Kelima sila tersebut memiliki makna yang sangat luas khususnya bagi implementasi Pancasila dalam politik luar negeri Indonesia. Berikut adalah kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia :

1) Ketuhanan yang maha esa yang memiliki makna

Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab :

Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Sila ini sangat berkaitan sekali dengan Penegakan HAM banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam politik luar negeri yaitu telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak ekonomi sosial dan budaya dan Konvenan internasional tentang hak Sipil dan politik.

3) Persatuan Indonesia

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-bhineka tunggal Ika. Membina rasa persatuan dan kesatuan.

Sila ini sangat berkaitan sekali dengan Politik bebas aktif karena dengan adanya politik bebas aktif sendiri Indonesia bebas untuk berteman dengan Negara manapun dan aktif dalam menjaga perdamaian agar terciptanya persatuan antara Negara-negara.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri. Berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Tidak memaksakan kehendak kepada Negara lain. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Dilakukannya musyawarah agar semua pihak mengetahui dan tidak ada yang dirugikan. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Bersikap adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan rakyat, menjunjung tinggi prinsip persamaan hukum, Mengakomodasikan kepentingan rakyat Indonesia ke dunia internasional dan hasilnya harus dirasakan secara adil untuk rakyat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu ada kebudayaan nasional yang menjadi dasar/landasan dalam mengembangkan hubungan-hubungan sosial dan kehidupan bersama sebagai bangsa (Handoyo, 2010: 287).

Pancasila yang Menyatukan Indonesia

Keberagaman harus dikelola dengan baik dan benar. Salah satu caranya adalah mengikat melalui sebuah ideologi yang telah

disepakati bersama dan tidak menguntungkan kelompok tertentu juga tidak merugikan kelompok lainnya. Dalam kaitannya masalah yang mutakhir terjadi, yakni kerenggangan antar kelompok, maka Pancasila sejatinya telah memainkan perannya untuk memperkokoh tali persaudaraan. Pancasila adalah nilai ke-Tuhanan yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. (Latif, 2011: 114-115).

Hal ini tercermin dari sila ke-3, Persatuan Indonesia. Sila ke-3 ini meniscayakan beberapa paradigma dan langkah nyata:

Pertama, usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan persaudaraan adalah fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Meskipun demikian, upaya secara sadar dan terencana untuk membangun persaudaraan harus tetap dipupuk. Kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dan patriotisme menjadi kuncinya.

Kedua, mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Tidak ada satu kelompok di dunia ini yang menginginkan adanya perpecahan. Ajaran suci agama-agama pun juga demikian, menekankan persatuan. Nilai itulah yang ditangkap oleh para founding fathers dan kemudian dirumuskan dalam Pancasila butir ke-3. Dengan demikian, pengamalannya adalah wajib menghargai perbedaan sebagai kekuatan.

Ketiga, perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan, tetapi justru dapat menciptakan kekuatan yang besar dan solid. Di era terbuka saat ini, kita diuntungkan karena bisa belajar dengan negara lain terkait persatuan dan perselisihan. Misalnya konflik di Timur Tengah. Perselisihan yang dikelola menyebabkan jutaan nyawa melayang dan yang masih hidup dibayang-bayangi oleh kematian.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia mampu:

- a. Menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan

negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan

- b. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara.
- c. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia tidak rendah diri
- d. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa
- e. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia
- f. Mengembangkan sikap tenggang rasa
- g. Tidak semena-mena terhadap orang lain
- h. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- i. Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- j. Berani membela kebenaran dan keadilan
- k. Merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.

Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah komitmen kebangsaan, alat pemersatu untuk mengatur sistem ketatanegaraan dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau kehidupan berpolitik. Dalam mengantisipasi ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip sosio-demokrasi yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi.

Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan ialah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif dengan semangat dasar kelima prinsip Pancasila, negara/bangsa Indonesia memiliki pandangan dunia yang begitu visioner dan tahan banting.

Pancasila sejatinya menyerukan kebersamaan, persatuan untuk tanah air. Nilai-nilai luhur pancasila yang dirumuskan dari beragam budaya dan kearifan lokal merupakan jati diri bangsa. Karenanya wajar jika pancasila sebagai ideologi bangsa, kita tangkap dengan keyakinan. Sebagai ideologi, pancasila memang bukan sesuatu yang diterima sebagai *taken of granted* melainkan sebuah ide dan karya anak bangsa yang mengandung spirit serta kekuatan bangsa

Indonesia di dalamnya. Pancasila adalah martabat bangsa yang ketika kita jaga sama artinya dengan menjaga martabat yang menggambarkan komitmen persaudaraan bangsa Indonesia.

Prinsip Dan Nilai Pancasila Sebagai Komitmen Persaudaraan

Prinsip adalah gagasan dasar yang mengandung kebenaran, berupa doktrin atau asumsi, yang terjalar dalam hukum atau tata pergaulan, yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Prinsip dipegang sebagai acuan dalam menentukan pilihan suatu pemikiran atau tindakan, menentukan pola pikir dan pola tindak, sehingga akan mewarnai tingkah laku pemegang prinsip dimaksud. Dengan demikian maka sila-sila dalam Pancasila itu memberi corak pada pola pikir dan pola tindak bangsa Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya. (Yudi Latif, 2011:40)

Bagian prinsip tersebut akan dibahas sebagai berikut:

Prinsip pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pola pikir, sikap dan tidak bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung di dalamnya. Orang bebas berfikir, bebas berusaha, namun sadar dan yakin bahwa akhirnya yang menentukan segalanya adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan acuan bahwa dalam olah pikir, olah rasa, dan olah tindak, manusia selalu mendudukan manusia lain sebagai mitra, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kewajibannya dihormati secara beradab. Dengan demikian tidak akan terjadi penindasan atau pemerasan. Segala aktivitas bersama berlangsung dalam keseimbangan, kesetaraan dan kerelaan.

Prinsip Ketiga, Persatuan Indonesia, pola pikir, sikap dan tindak bangsa Indonesia selalu mengacu bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. *Prinsip keempat*, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memberikan petunjuk dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku bahwa yang berdaulat dalam negara Republik Indonesia adalah seluruh

rakyat, sehingga rakyat harus didudukan secara terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Prinsip kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia memberikan acuan bagi olah pikir, olah sikap dan olah tindak bahwa yang ingin diwujudkan dengan adanya negara Republik Indonesia adalah kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Pemikiran yang mengarah pada terwujudnya kesejahteraan sepihak tidak dibenarkan.

Lima prinsip di atas merupakan pendukung dan sekaligus realisasi konsep-konsep yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, seperti konsep pluralistik, harmoni atau keselarasan, gotong royong dan kekeluargaan, integralistik. kerakyatan dan kebangsaan.

Bagian Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila akan dibahas sebagai berikut:

Nilai adalah hal yang memiliki makna bagi kehidupan manusia, kelompok masyarakat, bangsa atau dunia. Dengan hadir atau absennya nilai dalam suatu kehidupan, akan menimbulkan kepuasan diri manusia, sehingga manusia berusaha untuk merealisasikan atau menolak kehadirannya.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial. (Soegito, 2013: 142).

Nilai tersebut adalah perdamaian, keimanan, ketaqwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan atau harmoni, keberadaban, persatuan, kesatuan, permufakatan, kebijaksanaan dan kesejahteraan. Berikut penjabaran dari nilai yang dimaksud:

Damai merupakan situasi yang menggambarkan tiadanya konflik, segala unsur yang terlibat dalam suatu proses berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan keamanan. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi perebutan akan kepentingan.

Iman merupakan suatu keadaan yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan supranatural yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia adalah atas kehendakNya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.

Taqwa adalah suatu sikap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bersedia untuk mematuhi segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Ketaatan dan kepatuhan ini didasari oleh keikhlasan dan kerelaan.

Adil adalah menempatkan segala perkara pada tempatnya. Segala unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan dihormati dan didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, disesuaikan dengan peran fungsi dan kedudukannya.

Setara yaitu menempatkan segala perkara tanpa membeda-bedakan baik dari segi jender, suku, ras, agama, adat dan budaya.

Selaras atau harmoni merupakan suatu keadaan yang menggambarkan keteraturasn, ketertiban, ketaatan karena masing-masing unsur yang terlibat melaksanakan peran dan fungsi secara tepat, sehingga timbul rasa nikmat dalam suasana damai.

Beradab yaitu perwujudan komponen yang terlibat dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada adat budaya yang mencerminkan nilai dasar yang dipegang dalam kehidupan bersama.

Persatuan dan kesatuan mencerminkan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai komponen yang beraneka ragam, namun membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Mufakat adalah kesepakatan bersama dari hasil musyawarah. Suatu permufakatan dipegang teguh dalam kehidupan bersama, masing-masing unsur yang terlibat dalam permufakatan wajib mematuhi.

Bijaksana menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersendi pada kebenaran, dan keadilan. Bagi bangsa Indonesia tolok ukur kebijaksanaan tiada lain adalah prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejahtera merupakan kondisi atau situasi menggambarkan terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan manusia baik kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, yang akhirnya bermuara pada rasa damai. (Soeprapto, M.Ed Jakarta, September 2005)

Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama dari para pendiri negara untuk dijadikan sebagai ideologi negara. Ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. (Oetodo, 1991: 6)

PENUTUP

Simpulan

Pancasila sejatinya menyerukan kebersamaan, persatuan untuk tanah air. Semangat persatuan yang mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Berdasarkan nilai-nilai pancasila diharapkan bangsa Indonesia dapat memelihara dan mengembangkan gagasan-gagasan, konsep-konsep, teori-teori dan ide-ide baru tentang kehidupan politik.

Komitmen ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu: pertama, pemerintah untuk melakukan penyadaran tentang pentingnya persatuan dalam Indonesia yang bineka serta mendudukkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kedua, para tokoh agama menyerukan agar pemerintah bersikap tegas dan bijaksana dalam menanggapi situasi yang menjurus pada keretakan persatuan bangsa supaya memperkuat komitmen persaudaran. Ketiga, seluruh rakyat memiliki sikap dan bahasa yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup berbangsa dan bernegara, pendidikan politik dan sejarah kebangsaan dikuatkan kembali, baik kepada para politisi maupun elemen bangsa yang lain, demi masa depan bangsa. Sehingga terbentuknya komitmen persaudaraan sejati di antara semua elemen bangsa.

Saran

Pancasila hendaknya dijadikan sebagai bekal warga negara dalam mendefinisikan identitas dan tujuan dalam bermasyarakat. Hendaknya Pancasila sebagai dasar komitmen

persaudaraan untuk membentuk kekuatan ideologi dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Prinsip kesamaan pada nilai pancasila berkaitan dengan komitmen kemanusiaan hendaknya dijadikan sebagai ikatan persaudaraan bangsa Indonesia, menjangkau antar manusia dan antar bangsa secara global untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi yang luhur.

Yudi Latif, (2011). *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
<https://aliflukman.wordpress.com/2013/04/22>
Kompas, Presiden: "Pertahankan Pancasila Habis-Habisan", 2 Juni 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Handoyo, Eko., dkk. (2010). *Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Kaelan MS.(2004). *Pendidikan Pancasila*. Edisi Reformasi. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
Nurcholish Madjid, (1995). *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.

Oesman Oetodo dan Alfian. (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Onghokham dan Andi Achdian, (2006). "Pancasila : Dari Kontrak Sosial Menjadi Ideologi Negara", dalam Irfan Nasution dan Rony Agustinus (Peny.), *Restorasi Pancasila; Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok : FISIP UI

P. Hardono Hadi, (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius

Soegito,(2013). *Pendidikan Pancasila*, Semarang:UPT KU Universitas Negeri Semarang.

Soeprapto, M.Ed Jakarta, September 2005
Tim Lemhanas. (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Lemhanas.